

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan berjalannya roda pemerintahan karena jumlahnya relative stabil. Dari sector pajak yang diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai kebutuhan Negara dan aktivitas pembangunan dapat di wujudkan secara nyata.

Untuk melaksanakan system perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah. Masyarakat di Indonesia harus memahami pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang perpajakan. Undang-Undang perpajakan tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak maupun Tata Cara Perhitungan Pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1944). Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak, menurut Undang-Undang dan peraturan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan atau dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang ditunjukan oleh

pemerintah guna membiayai pengeluaran Negara, berkaitan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rimsky K. Judisseno., dalam bukunya pajak dan strategi bisnis (2005: 27). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “*Self Assesmen System*”. Dimana system ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, membayar, dan pengawasan terhadap pelaksanaan. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiayai pajak selain dengan meningkatkan motivasi, penjelasan, penyuluhan, dan pendidikan diperlukan komunikasi dua arah antara pemerintah diwakili Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan masyarakat atau Wajib Pajak. Oleh sebab itu komunikasi sangat berpengaruh dalam pencapaian Pembangunan Nasional.

Namun dalam pembayaran pajak masih banyak Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih bayar atau kurang bayar, maka Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat Pemberitahuan dan perlu dibeli himbuan. Untuk menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak dalam menagahi Wajib Pajak yang berhubungan dengan pajak terutang yang melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, maka

pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya pada Seksi Pemeriksaan Pajak memberikan bantuan kepada Wajib Pajak untuk dapat mengajukan kelebihan pembayaran pajak. Permohonan dapat dilakukan dengan mengisi kolom permohonan Restitusi yang tersedia pada Surat Pemberitahuan (SPT). Kelebihan pembayaran pajak dapat tersedia karena perhitungan wajib pajak sendiri atau karena adanya pemeriksaan oleh Aparatur Pajak atau Fiskus. Dengan adanya permohonan Restitusi dari Wajib Pajak tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan penelitian atau pemeriksaan, kemudian menetapkan Surat Ketentuan Lebih Bayar (SKPLB) dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan.

2. Perumusan Masalah

Bagaimana prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto ?

3. Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek

a. Tujuan Kerja Praktek

- 1) Untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

b. Manfaat Kerja Praktek

1) Bagi Penulis

- a) Untuk memperluas dan memantapkan keterampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja dengan program studi yang dipilih.
- b) Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- c) Memperoleh pengalaman kerja praktek.
- d) Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengalaman kerja di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tugas Akhir.

2) Bagi Instansi atau Perusahaan

- a) Memberikan bahan masukan atau usulan dalam meningkatkan perbaikan sistem yang ada di perusahaan.
- b) Mengetahui keadaan perusahaan dari sudut pandang dunia akademis.
- c) Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan.
- d) Mengetahui sudut pandang masyarakat terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

4. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan yaitu mengenai prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

Data primer dapat diperoleh melalui:

1) Metode Interview

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan/pegawai instansi.

2) Metode Observasi

Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan kerja praktek. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan laporan kerja praktek.

b. Data sekunder

Yaitu data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan kerja praktek.

Data sekunder dapat diperoleh melalui :

1) Dokumentasi

Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan cara melihat arsip yang disimpan disuatu media yang terdiri dari kumpulan karakter yang didokumentasikan.



KEGIATAN KERJA PRAKTEK

NO	KETERANGAN	BULAN															
		FEBUARI				MARET				APRIL				MEI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		TAHAP PERSIAPAN															
1	a. Mengajukan Judul		■														
	b. Mengurus Perizinan	■															
		TAHAP PELAKSANAAN															
2	a. Orientasi pada KPP Pratama Purwokerto					■											
	b. Mempelajari Sejarah KPP Pratama Purwokerto					■											
	c. Mempelajari struktur organisasi, visi misi					■											
	d. Kerja praktek di KPP Pratama Purwokerto					■											
	e. Penyusunan Laporan Kerja Praktek									■							
	f. Mengucapkan Terimakasih dan salam perpisahan kepada pegawai KPP Pratama Purwokerto										■						
		TAHAP PELAPORAN															
3	a. Melaporkan hasil PKL kepada Pembimbing													■			
	b. Menyusun laporan hasil PKL													■			
	c. Penyempurnaan laporan kerja praktek															■	

Gambar 1.1. Tabel Kegiatan Kerja Praktek